

Implementasi Program Pengembangan Kawasan Agropolitan Sembalun Kabupaten Lombok Timur

Baiq Diana Amalia Murty¹, Tjahjanulin Domai², Riyanto²

¹Magister Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

²Jurusan Ilmu Administras Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Abstrak

Pembangunan di Kecamatan Sembalun dengan potensi di bidang pertanian yang jauh tertinggal jika dibandingkan dengan kawasan perkotaan, sehingga pemerintah daerah Kabupaten Lombok Timur menginisiasi pengembangan program kawasan agropolitan Sembalun melalui Peraturan Daerah No. 2/2012 tentang RTRW hal ini sebagai upaya pemerataan pembangunan. Berdasarkan permasalahan tersebut maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi program pengembangan kawasan agropolitan dan mengetahui respon masyarakat terhadap implementasi program Agropolitan di Sembalun. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dengan teknik analisis data model interaktif Miles, Huberman and Saldana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Pengembangan kawasan agropolitan Sembalun telah memiliki masterplan pengembangan kawasan Agropolitan sebagai acuan untuk pengembangan, (2) lemahnya koordinasi dan komunikasi antar anggota tim koordinasi sehingga tujuan dan sasaran pengembangan program kurang diketahui oleh anggota tim koordinasi serta belum tersusunnya SOP pengembangan kawasan sehingga masih terlihat egosektoral dalam penentuan program pengembangan, (3) pengembangan kawasan belum sepenuhnya dapat diimplementasikan dengan baik yang disebabkan kurangnya sosialisasi program sehingga menyebabkan sikap resisten petani terhadap beberapa program pengembangan, tidak dilibatkannya petani dalam perumusan program sehingga petani kurang memiliki komitmen dalam melaksanakan program pengembangan. Agar pengembangan kawasan agropolitan Sembalun dapat berdampak signifikan terhadap pembangunan di Kecamatan Sembalun perlu dibangun komunikasi dan koordinasi yang efektif antar anggota tim koordinasi dan petani, sesegera mungkin menyusun SOP pengembangan kawasan, menggalakan sosialisasi program, serta melibatkan petani dalam penyusunan program pengembangan.

Kata kunci: Agropolitan, Implementasi program, Sikap implementor

Abstract

Development in Sembalun districts which have potential in agriculture are left behind with urban areas, so that the local governments initiate the development of Sembalun agropolitan program through Regional Regulation No. 2/2012 about RTRW as an effort to equitable development. Based on those problems, The purpose of this research to see the implementation of development programs of agropolitan Sembalun and public response to the implementation of the program. This study used a qualitative descriptive approach, with data analysis techniques interactive model of Miles, Huberman and Saldana. The research resulted (1) Development of agropolitan Sembalun has had a master plan as a reference for the development of the, (2) lack of coordination and communication among the team members so that the goals and objectives of program development is less known by members and no SOP drafting of development programs shown egosektoral in the determination of program, (3) development of the area has not been fully implemented properly due to lack of socialization program causing resistant attitude of farmers on some program development, non-involvement of farmers in the formulation of the program so that farmers lacked commitment in implementing development programs. In order agropolitan Sembalun have significant impacts on development of District Sembalun done by building a communication and effective coordination among members of the coordination team and the farmer, as soon as possible draw up SOP development of the region, promoting socialization programs, and involving farmers in the preparation of the development program.

Keywords: Agropolitan, Implementors attitude, Implementation programs

PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi yang pesat membuat sektor pertanian menjadi dikesampingkan,

padahal sektor ini merupakan sektor kunci untuk menjamin kualitas sumberdaya manusia Indonesia yang berkualitas dengan tetap tersedianya persediaan pangan dan menjamin tidak terjadinya rawan pangan. Selama ini ukuran keberhasilan pembangunan hanya dilihat dari terciptanya laju pertumbuhan perekonomian yang tinggi di mana alat yang dipergunakan adalah dengan mendorong industrialisasi di

Writer Correspondence Address:

Baiq Diana Amalia Murty

Email : diana_ashadi@yahoo.com

Address : Magister Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

kawasan-kawasan perkotaan. Kondisi ini bila ditinjau dari pemerataan pembangunan telah memunculkan kesenjangan antara kawasan perdesaan dan perkotaan karena sektor strategis hanya dimiliki oleh sebagian masyarakat yang umumnya berada pada kawasan perkotaan. [1]

Kesenjangan antara sektor industri dengan sektor pertanian itu tampak pada kesenjangan kota dan desa. Kegagalan pembangunan perdesaan menyebabkan terjadinya *backwash effect* atau terkurasnya sumberdaya di perdesaan, penguasaan terhadap pasar dan kesejahteraan yang dimiliki masyarakat di perkotaan. Wilayah perdesaan sebagai sentra produksi pertanian mengalami ketertinggalan sedangkan kota sebagai pusat pertumbuhan ekonomi mengalami pembangunan yang cepat.[2]

Pertanian harus didorong pertumbuhannya melalui kebijakan yang diformulasikan secara tepat. Kebijakan pembangunan pertanian ditujukan untuk meningkatkan ketahanan pangan, mengembangkan agribisnis dan meningkatkan kesejahteraan petani. Dengan tujuan tersebut mengisyaratkan bahwa produk pertanian yang dihasilkan harus memenuhi syarat kuantitas, kualitas dan kontinuitas sehingga mempunyai daya saing. Pembangunan secara otonom harus menekankan kebijakan-kebijakan pembangunan yang berdasarkan pada kekhasan daerah yang bersangkutan melalui penggunaan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, dan sumber daya fisik secara lokal. Sehingga pemerintah daerah dapat menyusun perencanaan pembangunan yang disesuaikan dengan potensi dan sumberdaya yang dimiliki termasuk untuk menumbuhkan sektor ekonomi daerahnya melalui pengembangan Kawasan Strategis. Agar tujuan pembangunan dapat tercapai, penting untuk merencanakan pembangunan berbasis sumberdaya lokal dengan pendekatan pembangunan wilayah dan dengan melibatkan partisipasi masyarakat yang seluas-luasnya.

Pembangunan yang berbasis sumber daya lokal, menggunakan pendekatan wilayah serta melibatkan partisipasi dari masyarakat adalah pengembangan kawasan agropolitan yang dikemukakan Friedman dan Douglass (1975) yang menawarkan konsep Agropolitan sebagai kritik dari teori *trickle down effect*, yang menegaskan pembangunan di pusat-pusat perkotaan agar hasilnya bisa menetes ke perdesaan. Namun teori ini tidak tahan uji dengan semangat otomi daerah, daerah pun kemudian menyambut

konsep agropolitan yang lebih komprehensif dalam pengembangan wilayah.[3]

Dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menyebutkan bahwa “penataan kawasan perdesaan diarahkan untuk pemberdayaan masyarakat perdesaan, pertahanan kualitas lingkungan setempat dan wilayah yang didukungnya, konservasi sumber daya alam, pelestarian warisan budaya lokal, pertahanan kawasan lahan abadi pertanian pangan untuk ketahanan pangan dan penjagaan keseimbangan pembangunan perdesaan-perkotaan”. Mengacu pada undang-undang ini pemerintah daerah diberi kewenangan untuk menetapkan kawasan strategis kabupaten untuk mengembangkan potensi wilayah. Sehingga pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengembangkan sektor pertanian daerah secara mandiri berdasarkan potensi sosial ekonomi dan karakteristik wilayah, sehingga diharapkan sektor pertanian dapat menjamin ketersediaan bahan pangan untuk skala daerah.

Berdasarkan permasalahan pembangunan perdesaan yang terjadi, pengembangan kawasan agropolitan merupakan alternatif solusi untuk pengembangan wilayah (perdesaan). Agropolis berarti kota kecil dan menengah di sekitar pedesaan (*micro urban village*) yang tumbuh dan berkembang dalam suatu sistem yang komprehensif dari aktivitas agribisnis untuk mendorong kegiatan pertanian di wilayah sekitarnya.

Belum meratanya pembangunan di Kabupaten Lombok Timur, dimana wilayah Utara dan Selatan semakin jauh tertinggal pembangunannya dari wilayah perkotaan dimana wilayah utara memiliki potensi sektor pertanian terutama hortikultura dan perkebunan. Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang, pada tahun 2012 Kecamatan Sembalun ditetapkan sebagai wilayah pengembangan Kawasan Agropolitan di Lombok Timur melalui Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Pasal 33 mengenai Penetapan Kawasan Strategis disebutkan pada Ayat 5 huruf a bahwa “penetapan kawasan agropolitan Sembalun meliputi Kecamatan Sembalun dengan sektor unggulan hortikultura”. Dimana penataan ruang kawasan strategis diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting. RTRW Kabupaten merupakan rencana penataan dan pengembangan kawasan untuk rentang waktu 20 tahun dimana RTRW menjadi pedoman untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah (RPJPD) maupun untuk menyusun Rencana Pembanguana Jangka Panjang Menengah (RPJMD).

Dalam RPJMD Kabupaten Lombok Timur dalam menjamin terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat pemerintah daerah menjabarkannya dalam misi ke 4 revitalisasi pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, kelautan dan kehutanan. Penetapan Kecamatan Sembalun sebagai sentra produksi bawang putih secara nasional berdampak pada pemakaian pupuk kimia yang berlebihan untuk meningkatkan asil produksi sehingga membuat unsur hara menjadi hilang dan struktur tanah menjadi keras, kemudian hasil penelitian yang dilakukan baik oleh IPB dan Universitas Mataram menyimpulkan bahwa kondisi tanah di Kecamatan Sembaun telah rusak. Rusaknya struktur tanah membuat terpuruk perekonomian petani. Sehingga pertumbuhan Kecamatan Sembalun semakin tertinggal dari wilayah perkotaan. Potensi pertanian yang dimiliki Kecamatan Sembalun menjadi pertimbangan pemerintah daerah untuk menetapkan Kecamatan ini sebagai Kawasan Strategis Kabupaten untuk kepentingan ekonomi dengan mengembangkan holtikultura sebagai komoditas unggulan. Hal ini mendorong pemerintah untuk merencanakan dan mengintegrasikan perencanaan dan tata ruang wilayah, sehingga kecamatan ini bisa tumbuh dan berkembang mengejar ketertinggalan dari daerah perkotaan.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi program pengembangan Kawasan Agropolitan Sembalun, dan mengetahui respon masyarakat terhadap program pengembangan Kawasan Agropolitan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dimana menjelaskan objek penelitian secara komprehensif.

Metode Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data dengan observasi terhadap fenomena yang terjadi pada lokasi penelitian yang dilakukan dengan sistematis, wawancara dilakukan pada pejabat maupun staf dinas yang terkait dalam Program Pengembangan Kawasan Agropolitan Sembalun, serta mendokumentasikan kondisi pada Kawasan Agropolitan, masyarakat yang diwawancarai serta meng-copy beberapa dokumen terkait

pengembangan Kawasan seperti Masterplan Kawasan, Peraturan Daerah, RPJMD dan RTRW. Teknik Analisis Data untuk menyajikan data hasil penelitian agar lebih bermakna dan mudah dipahami dengan menggunakan *Interactive Model Analysis* Miles, Huberman dan Saldana.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam mewujudkan Misi ke 4 (empat) RPJMD Kabupaten Lombok Timur yaitu Revitalisasi pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, kelautan dan kehutanan, maka untuk sektor pertanian Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur membentuk Kawasan Strategis Kabupaten untuk kepentingan Ekonomi salah satunya dengan menetapkan Kecamatan Sembalun sebagai Kawasan Agropolitan untuk pengembangan holtikultura dengan payung hukum pelaksanaan berupa Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Implementasi Pengembangan Kawasan Agropolitan Sembalun

1. Dokumen Rencana Pengembangan Kawasan Agropolitan Sembalun
 - a. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lombok Timur merupakan dokumen perencanaan pemanfaatan ruang di Kabupaten Lombok Timur, yang mengatur tentang kawasan strategis kabupaten baik untuk kepentingan ekonomi, budaya dan lingkungan. Dokumen ini mengatur Kecamatan Sembalun sebagai kawasan agropolitan beserta pusat pengembangan kawasan (PPK) dan komoditas unggulan yang akan dikembangkan serta pemanfaatan ruang dalam kawasan.
 - b. Masterplan Pengembangan Kawasan Agropolitan Sembalun yang merupakan dokumen perencanaan pengembangan kawasan, arah pengembangan serta program dan strategi pengembangan kawasan.

Kawasan agropolitan Sembalun merupakan bentuk dari penyelenggaraan penataan ruang kawasan perdesaan sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. Pengembangan kawasan agropolitan Sembalun juga dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi pelayanan prasarana dan sarana penunjang kegiatan pertanian, baik yang dibutuhkan sebelum proses produksi, dalam

proses produksi, maupun setelah proses produksi.

Adapun komoditas unggulan yang dikembangkan pada Kawasan Agropolitan Sembalun adalah:

1. Untuk tanaman pangan adalah padi, dengan komoditas penunjang meliputi kacang tanah, ubi kayu dan jagung.
2. Untuk tanaman hortikultura, berupa tanaman sayur-sayuran adalah bawang putih, kentang dan wortel, dengan komoditas penunjang meliputi kubis, bawang merah, cabe besar, tomat, kacang merah dan cabe rawit. Holtikultura berupa buah-buahan yang diunggulkan adalah nangka dan strawberry dengan komoditas penunjang meliputi jeruk, jambu, mangga, pisang dan durian.
3. Komoditas unggulan tanaman perkebunan adalah kopi, dengan komoditas penunjang meliputi jambu mete, kakao, kapuk, cengkeh, asam, kelapa dan pinang.

Penentuan sektor atau komoditas agribisnis unggulan dilakukan dengan beberapa pertimbangan, yaitu :

- a. Mempunyai tingkat kesesuaian agroekologi yang tinggi.
- b. Mempunyai pasar yang jelas.
- c. Mempunyai kemampuan yang tinggi dalam menciptakan nilai tambah (pendapatan) dan kesempatan kerja.
- d. Mempunyai kemampuan dalam meningkatkan ketahanan pangan masyarakat berpendapatan rendah.
- e. Mempunyai dukungan kebijakan pemerintah dalam bidang-bidang teknologi, prasarana, infrastruktur, kelembagaan, permodalan dan lainnya Merupakan komoditas yang telah diusahakan oleh masyarakat setempat.
- f. Mempunyai kelayakan untuk diusahakan baik secara financial maupun ekonomi. [4]

Dari segi ketersediaan dokumen, kawasan ini telah memiliki dokumen perencanaan yang memadai dan sesuai dengan arahan pengembangan kawasan agropolitan dari pusat. Ketersediaan dokumen perencanaan mutlak diperlukan sebagai arahan dalam pelaksanaan pengembangan kawasan, penetapan prioritas pengembangan dan untuk mengoptimisasi sumberdaya baik sumberdaya manusia maupun pendanaan. Masterplan kawasan memuat perencanaan baik jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang yang telah memenuhi kaidah-kaidah perencanaan dimana telah dilakukan penyusunan rencana dengan

melakukan review terhadap kondisi eksisting, memperkirakan kondisi pada masa yang akan datang terutama pemanfaatan ruang, penetapan tujuan dan sasaran, penyusunan program dan persetujuan rencana dengan terbitnya perda RTRW. Disamping itu juga telah dilakukan penyusunan program rencana yang berisi tujuan dan sasaran yang lebih rinci beserta waktu pelaksanaannya.

Organisasi Pelaksana Pengembangan Kawasan Agropolitan Sembalun

Model kelembagaan Tim Koordinasi dipilih karena pengembangan Kawasan Agropolitan Sembalun ini mempunyai sifat multifungsional atau lintas sektoral. Artinya, implementasi pengembangan kawasan ini akan melibatkan peran berbagai sektor bersifat vertikal (Nasional dan Propinsi) maupun horizontal (SKPD Kabupaten, Pemerintahan Kecamatan, Pemerintahan Desa dan UPTD lainnya).

Komunikasi dan koordinasi yang kurang efektif, tidak dilakukannya monitoring dan pelaporan program secara kontinyu menyebabkan tidak terukurnya tingkat keberhasilan pelaksanaan program, lemahnya monitoring menyebabkan petani selaku implementor merasa ditinggalkan dan tidak adanya evaluasi menyebabkan tidak adanya masukan untuk peningkatan program yang akan dilaksanakan. Komunikasi dan koordinasi dalam tim koordinasi pengembangan kawasan agropolitan Sembalun belum terlaksana dengan baik, dengan adanya egosektoral menyebabkan adanya tumpang tindih program, target dan sasaran implementasi program pengembangan yang kurang optimal padahal komunikasi dan koordinasi merupakan hal penting dalam implementasi program. Hal ini seperti hasil penelitian Mazdalifa (2011) pada pengembangan kawasan agropolitan Kabupaten Lamongan yang menyimpulkan bahwa jika komunikasi dan kerjasama dalam tim pokja tersebut tidak berjalan dengan baik maka penyamaan persepsi terhadap visi dan misi dari kebijakan pengembangan kawasan Agropolitan juga sulit untuk dicapai.[5]

Koordinasi bukanlah sekedar menyangkut persoalan mengkomunikasikan informasi ataupun membentuk struktur-struktur administrasi yang cocok, melainkan menyangkut pula persoalan yang lebih mendasar, yaitu praktik pelaksanaan kebijakan” [6]. Berdasarkan teori ini maka semakin baik koordinasi dan komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu

proses implementasi, maka dapat meminimalisir terjadinya kesalahan-kesalahan dalam implementasi program. Hal ini juga yang dikemukakan dalam jurnal [7] bahwa komunikasi merupakan faktor yang paling dominan dalam implementasi program pengembangan kawasan agropolitan.

Kejelasan stadar dan sasaran kebijakan sangat penting untuk dipahami oleh para pelaksana dengan perlunya ketepatan komunikasi antar organisasi, disamping itu adanya penguatan aktivitas. Dengan ketepatan komunikasi maka pihak-pihak yang terlibat dapat memahami kejelasan stadar dan sasaran kebijakan sehingga akan mengeliminir kesalahan-kesalahan yang mungkin akan timbul.

Standard Operating Procedures (SOP) Pelaksanaan Pengembangan Kawasan Agropolitan Sembalun

SOP (*Standard Operating Procedures*) adalah panduan hasil kerja yang diinginkan serta proses kerja yang harus dilaksanakan. Untuk pelaksanaan program pengembangan kawasan agropolitan Sembalun ini belum memiliki SOP sehingga pelaksanaannya bersifat parsial, dan program yang diarahkan dalam kawasan direncanakan oleh masing-masing SKPD yang tergabung dalam tim koordinasi. Hal ini mengakibatkan adanya program-program dengan sasaran yang sama sehingga terjadi tumpang tindih program. Hal ini menjadi kendala dalam keberhasilan pelaksanaan program, dimana tidak adanya kejelasan SKPD yang bertanggungjawab, kapan harus melakukan kegiatan dan bagaimana pelaksanaannya sehingga tidak dapat dilakukan evaluasi terhadap program yang telah berjalan, serta adanya tumpang tindih program sehingga terkesan pengembangan kawasan menjadi tidak jelas. Tingkat keberhasilan program menjadi sulit untuk terukur.

Manfaat dari SOP adalah menjadi pedoman dalam melaksanakan tugas, menyelesaikan pekerjaan secara konsisten, sebagai alat komunikasi dan pengawasan [8]. Aryani *et al* menyebutkan bahwa koordinasi dan monitoring hendaknya diupayakan agar semua kegiatan pembangunan yang dilakukan bisa berjalan serasi dan menghasilkan sinergi untuk menjamin bahwa semua kegiatan berjalan dalam arah yang sesuai dan menuju pada pencapaian tujuan. Koordinasi dan monitoring yang demikian merupakan upaya untuk menghasilkan kegiatan yang efisien dalam pemanfaatan sumber daya untuk menjamin

tercapainya tujuan dan sasaran secara optimal.[7]

Realisasi Program Pengembangan Kawasan Agropolitan Sembalun

Pengembangan kawasan ini sebagai salah satu komitmen pemerintah daerah untuk mewujudkan misi dalam RPJMD yaitu revitalisasi pertanian sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan petani, mampu menjamin ketersediaan pangan baik untuk skala kawasan maupun diluar kawasan. Dimana payung hukum pelaksanaannya berupa peraturan daerah No 2 Tahun 2012 tentang RTRW.

Beberapa program pengembangan yang belum terlaksana dengan optimal disebabkan kurang terakomodirnya aspirasi masyarakat sehingga masukan dan aspirasi dari masyarakat perlu digali dan diidentifikasi dalam rangka perencanaan pengembangan Kawasan Agropolitan Sembalun. Sedangkan untuk pembangunan fisik, pengembangan kawasan telah berdampak signifikan terhadap pembangunan. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Pranoto *et al* (2006) pada kawasan agropolitan di pulau Jawa yang menyimpulkan bahwa pengembangan agropolitan secara signifikan berpengaruh terhadap peningkatan sarana dan prasarana pada kawasan agropolitan [9].

Namun dalam pelaksanaan pengembangan Kawasan Agropolitan Sembalun saat ini masih merupakan bentuk perencanaan *top down* dan *given* dari pemerintah daerah dimana masyarakat hanya diposisikan sebagai subyek pembangunan dimana seyogyanya dalam pelaksanaan program agropolitan, masyarakat harus ditempatkan sebagai pelaku utama sedangkan pemerintah berperan memberikan fasilitasi dan pendampingan sehingga dicapai keberhasilan yang lebih optimal. Masyarakat belum diberikan ruang untuk memberikan masukan program yang mereka butuhkan. Keterlibatan masyarakat secara aktif baik dalam perumusan program dan implementasinya akan menjadi faktor utama penentu keberhasilan program.

Hal lain yang menyebabkan terhambatnya implementasi program pengembangan yaitu kurangnya sumberdaya baik berupa sumberdaya manusia maupun pendanaan untuk pengembangan kawasan. Keterbatasan sumberdaya dalam hal ini pendanaan maupun tenaga yang berkompetensi yang dimiliki pemerintah daerah untuk bisa membangun

senra pembibitan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan program. Modal diperlukan untuk kelancaran pembiayaan kebijakan agar tidak menghambat proses kebijakan.

Tabel 1. Penilaian Implementasi Program Pengembangan Kawasan Agropolitan Sembalun

No	Program Pengembangan	Sub Program	Outcome	Penilaian
1	Program Pengembangan sistem agroindustri	Pengembangan sub sistem agroindustri hulu	Mampu menjamin ketersediaan benih, pupuk organik, dan pestisida untuk petani, melakukan penyuluhan pertanian holtikultura dan pertanian organik, penyuluhan dan pembibitan varietas unggul.	Tercapai, namun hasilnya belum optimal karena petani masih bergantung pada pupuk kimia sehingga pertanian organik belum sepenuhnya terlaksana
		Pengembangan sub sistem usaha produksi	Memberikan bantuan mesin traktor dan alat pertanian, membangun sistem irigasi	Terlaksana untuk penyediaan alat namun tidak termanfaatkan oleh petani karena akan mengurangi penyerapan tenaga kerja.
		Pengembangan sub sistem pengolahan dan pasca panen	Penyediaan pengemasan hasil panen, mesin pengolahan dan mesin pengemasan hasil olahan hasil pertanian, pelatihan pengolahan hasil pertanian	Terlaksana untuk penyediaan alat dan pengolahannya namun belum termanfaatkan oleh petani.
		Pengembangan sub sistem pemasaran hasil	Rehabilitasi jalan usaha tani, Pembangunan sub terminal agro, pengembangan industri UKM, menyusun strategi pemasaran komoditas unggulan.	Terlaksana namun belum optimal, belum terbentuk ukm untuk pengolahan hasil pertanian dan belum dikenal luasnya kawasan beserta komoditas unggulannya
		Program pengembangan sub sistem jasa penunjang	Pembentukan kelompok tani, KUD, pembangunan pusat pembibitan,	Terlaksana namun belum optimal, keterbatasan dana sehingga pembangunan pusat pembibitan belum terbangun
2	Program pengembangan sarana dan prasarana pendukung		Rehabilitasi jalan penghubung kawasan, pembangunan fasilitas kesehatan dan pendidikan, pusat informasi pertanian, jaringan komunikasi, jaringan air bersih.	Terlaksana dengan baik, ketergantungan kawasan akan daerah perkotaan dapat dikurangi
3	Program pengembangan komoditas unggulan berdasarkan kesesuaian lahan		Pemilihan jenis tanaman yang disesuaikan dengan potensi lahan yang ada.	Tidak terlaksana, akibat petani memilih menanam komoditas yang diminati pasar meski potensi lahan tidak sesuai
4	Program pengembangan pusat pelayanan kawasan (PPK)		Pengembangan Desa Sembalun Lawang sebagai PPK yang dilengkapi dengan berbagai sarana dan prasana sesuai RTRW, pembangunan industry yang memanfaatkan bahan mentah dari desa dalam kawasan	Terlaksana namun belum optimal, belum terlaksananya timbale balik antara pusat kawasan dengan desa disekitarnya, belum terbangunnya industry yang memanfaatkan raw material yang dihasilkan
5	Program pengembangan kelembagaan untuk mendukung kawasan agropolitan		Membentuk tim koordinasi untuk tingkat SKPD dan memperkuat kelembagaan kelompok tani.	Terlaksana, namun belum optimal, dimana masih terlihat egosektoral dalam penetapan program, dan kelompok tani hanya aktif saat adanya bantuan.
6	Program pengembangan		Pengembangan potensi wisata yang dimiliki	Belum menjadi fokus pengembangan untuk program jangka pendek

	potensi agrowisata		bersinergi dengan pengembangan kawasan agropolitan.	
--	--------------------	--	---	--

Sumber : diolah dari hasil penelitian

Van Meter dan Van Horn yang dikutip Agustino (2006; h. 142) menyebutkan bahwa “keberhasilan implemetasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh kemampuan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia baik sumberdaya manusia, biaya dan waktu” [9].

Respon Masyarakat Terhadap Implementasi Program Pengembangan Kawasan Agropolitan Sembalun, Adanya resistensi petani terhadap implementasi program disebabkan kurangnya sosialisasi kepada petani sebagai implementor (disposisi) yang menyebabkan kurangnya pemahaman petani akan program pengembangan dan tujuan dari pengembangan kawasan agropolitan sehingga mereka bersikap resisten terhadap program pengembangan. Disamping itu adanya beberapa program yang dinilai petani kurang sesuai dengan kebutuhan petani untuk mengembangkan sektor pertanian. Hasil penelitian Sofwanto *et al* (2006) menyimpulkan bahwa adanya pemahaman petani terhadap program pengembangan kawasan menjadi faktor penentu keberhasilan pelaksanaan program.[11]

Sehingga diperlukan sosialisasi secara aktif tentang kawasan agropolitan sehingga petani sebagai implementor memiliki pemahaman tentang kawasan agropolitan beserta program pengembangan yang ada sehingga mereka bersedia melaksanakan pembangunan sesuai keinginan pemerintah selaku pembuat kebijakan. Syamsi mengemukakan salah satu faktor dominan bagi keberhasilan pembangunan adalah respon masyarakat melalui sikap (*attitudes*) dan peran sertanya (*participation*), sehingga dengan partisipasi ini masyarakat diikutsertakan dalam pembuatan keputusan, pelaksanaan, penikmatan manfaat atau hasil serta dalam pengevaluasian hasil pembangunan. Keikutsertaan masyarakat dalam pembuatan keputusan dapat menumbuhkan perencanaan dari bawah (*bottom-up planning*).[12]

KESIMPULAN

1. Implementasi Pengembangan Kawasan Agropolitan Sembalun
 - a. Salah satu persyaratan pokok dalam pengembangan Kawasan Agropolitan adalah tersusunnya masterplan kawasan

- agropolitan sebagai acuan untuk pengembangan wilayah Kabupaten, penetapan prioritas dan optimalisasi sumberdaya baik manusia maupun pendanaan sehingga pengembangan kawasan ini telah sesuai dengan arahan pengembangan kawasan agropolitan dari pemerintah pusat. Namun beberapa kebijakan program yang dikeluarkan dirasa kurang konsisten dan kurang efektif.
- b. Dalam implementasi program pengembangan kawasan fungsi koordinasi dan komunikasi belum dilakukan dengan baik antar SKPD dalam tim koordinasi yang dibuktikan dengan belum adanya persamaan persepsi dan pandangan mengenai program pengembangan kawasan, adanya egosektoral yang ditunjukkan dengan perencanaan program yang dilakukan secara parsial oleh masing-masing SKPD dalam tim koordinasi sehingga terjadi tumpang tindih program, belum adanya monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program sehingga tingkat keberhasilan menjadi bias.
 - c. Belum tersusunnya SOP untuk pelaksanaan program menjadi kendala dalam keberhasilan pelaksanaan program, sehingga tidak ada kejelasan SKPD yang bertanggungjawab dalam melaksanakan suatu program, kapan harus melakukan kegiatan dan bagaimana pelaksanaannya sehingga tidak dapat dilakukan evaluasi terhadap program yang telah berjalan, adanya tumpang tindih program sehingga terkesan pengembangan kawasan menjadi tidak jelas dan tingkat keberhasilan program menjadi sulit untuk terukur.
 - d. Secara umum, pengembangan kawasan agropolitan Sembalun ini belum efektif karena belum sepenuhnya tumbuh menjadi kawasan agropolitan, dimana belum terbetuk ciri-ciri dari kawasan agropolitan yang berkembang. Ada beberapa hal yang menyebabkan terhambatnya implementasi program pengembangan antara lain adanya kurangnya sosialisasi program serta kurangnya sumberdaya baik sumberdaya manusia maupun pendanaan untuk pengembangan kawasan.

2. Respon Masyarakat Terhadap Implementasi Program Pengembangan Kawasan Agropolitan Sembalun

Adanya resistensi petani terhadap implementasi program disebabkan kurangnya sosialisasi kepada petani sebagai implementor serta ketidaksesuaian antara program yang direncanakan dengan kebutuhan petani (disposisi). Kurangnya sosialisasi menyebabkan kurangnya pemahaman petani akan program pengembangan dan tujuan dari pengembangan kawasan agropolitan sehingga mereka bersikap resisten terhadap program pengembangan. Disisi lain, kebijakan-kebijakan pemerintah masih kurang berpihak kepada petani, dimana sebagian program dinilai kurang sesuai dengan kebutuhan petani untuk peningkatan usaha pertanian. Serta tidak dilibatkannya petani dalam perumusan program pengembangan menyebabkan rendahnya komitmen petani untuk melaksanakan program yang ada. Hasil penelitian Sofwanto *et al* (2006) membuktikan bahwa adanya pemahaman petani tentang program pengembangan kawasan agropolitan menjadi factor penentu keberhasilan program pengembangan. [

Saran

1. Pengembangan kawasan harus melibatkan peran masyarakat dalam perumusan program pengembangan kawasan agropolitan Sembalun, sehingga perlu dilakukan revisi terhadap masterplan kawasan yang ada;
2. Meningkatkan komunikasi organisasi baik ditingkat pemerintah daerah selaku perumus kebijakan;
3. Melakukan sosialisasi secara intensif terhadap program-program pengembangan kawasan yang telah direncanakan agar petani dapat menerima dan mengerti program yang akan dilaksanakan;
4. Mengembangkan potensi pariwisata yang dimiliki kawasan yang disinergikan dengan pengembangan kawasan agropolitan. Agrowisata diharapkan dapat memberikan *trickle down effect* kepada masyarakat sekitar.

UCAPAN TERIMA KASIH

1. Pusbindiklatren BAPPENAS, yang telah memberikan donasi Beasiswa
2. Semua pihak terkait yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan publikasi ilmiah ini.

DAFTAR PUSTAKA

- [1]. Mubyarto. *Drama Ekonomi Indonesia. Belajar Dari Kegagalan Ekonomi Orde Baru.* Kreasi Wacana. Yogyakarta. 2004.
- [2]. Friedman and J, Douglas. M. *Agropolitan Development, Toward a New Strategy for Regional Development in Asia.* MIT Press. Massacuset. 1975.
- [3]. Wardhono, Fitri Indra. *Himpunan Makalah Tentang Agropolitan, Pembangunan Desa dan Kawasan Terpadu Mandiri.* 2003.
- [4]. Mazdalifa, Ayudya Fitria, M. Irfan Islamy, Fadillah Putra. 2011. *Implementasi Kebijakan Pengembangan Kawasan Agropolitan Di Kabupaten Lamongan.* Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol 1, No.3.
- [5]. Wahab, Solichin Abdul. *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara.* Edisi kedua. PT. Bumi Aksara. Jakarta. 2008. H, 77
- [6]. Ariyani, Dini, Abdul Hakim, Irwan Noor, 2014. *Pengaruh Faktor Komunikasi, Sumberdaya, Sikap Pelaksana dan Struktur Birokrasi Terhadap Output Implementasi Program Pengembangan Kawasan Agropolitan di Kabupaten Probolinggo.* J-PAL, Vol. 5, No. 2, 2014.
- [7]. Puspitasari, Devi dan Rina Rosmawati. *Pelayanan Prima (Service Excellent) SMK Bisnis dan Manajemen.* CV Arya Duta, Jakarta. 2010.
- [8]. Pranoto, Sugimin, M. Syamsul Ma'arif, Surjono H. Sutjahjo, dan Hermanto Siregar. 2006. *Pembangunan Perdesaan Berkelanjutan Melalui Model Pengembangan Agropolitan.* Jurnal Manajemen dan Agribisnis Vol.3 No. 1.
- [9]. Agustino, Leo. *Dasar-dasar Kebijakan Publik.* Alfabeta. Bandung. 2006.
- [10]. Sofwanto, Awaludin, Basita Ginting Sugihen, Djoko Susanto. 2006. *Persepsi Petani Tentang Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Upaya Pengembangan Agribisnis Sayuran (Kasus Petani Sayuran Peserta Program Kawasan Agropolitan Desa Sindang Jaya Kecamatan Cipanas*

- Kabupaten Cianjur*). Jurnal Penyuluhan Vol. 2, No.1.
- [11]. Syamsi, Ibnu. *Pokok-pokok Kebijakan, Perencanaan, Pemrograman dan Penganggaran Pembangunan Tingkat Nasional dan Regional*. CV. Rajawali. Jakarta. 1986.